STUDI KOMPARATIF PERBANDINGAN MENGENAI PENGATURAN PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN MESIR

Daniel, Revolusi Shandi Negara, Cheryl Michaelia Ongkowiguno,
Muhammad Fadhil Ardian, Fareta Angelica Ichwana Putri,
Muhammad Yanri Chairyatna, Muhammad Fadhil Bagaskara,
Dwi Aryanti Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Email: 2010611016@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah membahas mengenai perbandingan reformasi hukum keluarga di dunia Islam terkait tentang perceraian. Khususnya pada perbandingan hukum perceraian antara negara Mesir dengan Indonesia, yang dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan materi hukum dari masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, reformasi hukum keluarga antara Mesir dengan Indonesia sangatlah berbeda, hal ini disebabkan latar belakang yang mempengaruhinya. Mesir dipengaruhi oleh kerajaan Turki Usmani sedang Indonesia dipengaruhi Belanda; Kedua, baik Mesir dan Indonesia memiliki aturan perceraian yang terkodifikasi dalam bentuk berdasar undang-undang; Ketiga, terdapat perbedaan signifikan mengenai hukum perceraian yang dimiliki oleh negara Mesir dan Indonesia baik perbedaan itu secara vertikal, horizontal dan diagonal.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum Perceraian, Mesir, Indonesia.

ABSTRACT

The aim of this research is to discuss comparative family law reforms in the Islamic world regarding divorce. In particular, the comparison of divorce law between Egypt and Indonesia, which was analyzed using a qualitative approach, based on legal material from each country. The research results show that First, family law reform between Egypt and Indonesia is very different, this is due to the background that influenced it. Egypt was influenced by the Ottoman Empire while Indonesia was influenced by the Netherlands; Second, both Egypt and Indonesia have divorce regulations that are codified in a statutory form; Third, there are significant differences regarding the divorce laws of Egypt and Indonesia, both vertically, horizontally and diagonally.

Keywords: Comparison of Divorce Laws, Egypt, Indonesia

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri hubungan *partnership*, yang berarti mereka saling membutuhkan, saling melengkapi, dan berada pada posisi sejajar. Rumah tangga biasanya makmur dan harmonis karena keduanya, suami dan istri, menjalankan fungsi atau peran masing-masing. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Jika tujuan lain dapat terpenuhi, tujuan ini dapat dicapai secara sempurna. Dengan kata lain, tujuan lain membantu mencapai tujuan utama; contohnya, tujuan reproduksi, biologis, menjaga diri, dan ibadah.¹

Namun, menurut Yahya Harahap, tujuan perkawinan harus diwujudkan melalui tindakan yang bersifat "mutual", yaitu *mutual corporation*, *mutual help*, *mutual understanding*, *mutual relation*, dan *mutual underdefendency*.² Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw., "Hendaklah kamu saling nasihat dan menasehati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik." Membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan; banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang sering menyebabkan perceraian. Kitab-kitab Fiqh mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena setidaknya empat hal berikut: yakni: *Pertama*, terjadinya *nusyuz* dari pihak istri, *Kedua*, *nusyuz* suami terhadap istri, *Ketiga*, terjadinya *syikak*, *Keempat*, salah satu pihak melakukan zina (*fakhisyah*).

Keutuhan rumah tangga yang diharapkan al-Qur'an dengan tetap harmonis menjadi pasangan yang saling mendampingi satu sama lain. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam menjunjung tinggi hak-hak kaum laki-laki dan kaum perempuan. Artinya, keutuhan rumah tangga dalam bingkai *sakinah mawaddah warahmah* merupakan hak paten yang diimpikan seluruh orang yang mengarungi bahtera rumah tangga. Setiap orang dapat berbuat salah dan khilaf serta lupa, namun diperlukan saling pengertian antar satu sama lain dalam membangun rumah tangga, agar tetap utuh dan tidak terjadi perceraian.

Masih berkaitan dengan persoalan hukum di negeri-negeri Muslim, persoalan keluarga umumnya dan perkawinan khususnya (yang terkait dengan persoalan hukum perdata) kebanyakan mendapatkan porsi perhatian yang cukup besar terutama jika dikaitkan dengan persoalan akulturasi antara hukum Islam dan budaya setempat yang kemudian dibentuk dalam sebuah hukum yang diberlakukan dalam

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Revisi. (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013).hlm.43.

² Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. 1. (Jakarta: Pranada Group, 2016).hlm.28.

sebuah negara tersebut (dikenal dengan hukum positif), termasuk persoalan yang paling krusial dalam sebuah perkawinan yaitu perceraian.

Reformasi hukum keluarga Mesir dimulai tahun 1915 dengan mengangkat Syaikh al-Maraghi (rektor Univ. al-Azhar) sebagai tim reformasi hukum keluarga. Pada akhirnya, tahun 1920 lahirlah Law No 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian, sebagai undang-undang hukum keluarga pertama yang berlaku. Tidak berhenti di situ, pembaharuan hukum keluarga tetap berlanjut, dimana UU No. 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian serta UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian mengalami amandemen pada tahun 1979, sehingga lahirlah UU No. 44 tahun 1979 yang kemudian dikenal dengan sebutan hukum Jihan Sadat dan pada tahun 1985 terbentuklah Personal Status (Amandemen) Law No. 100 tahun 1985.³ Reformasi hukum keluarga Mesir tepatnya dalam hal perceraian sempat muncul kembali menjadi isu publik, dimana presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ingin mereformasi hukum perceraian dengan melegalkan perceraian lisan (bi al-lisan). Namun, hal itu ditolak oleh dewan ulama Mesir.⁴

Pasca Indonesia merdeka, reformasi pembaharuan hukum mulai dilakukan pemerintah dengan membentuk peraturan yang berkenaan dengan perkawinan, tepatnya dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang isinya hanya terdiri dari 7 pasal. Pemberlakuan undang-undang ini pertama hanya diperuntukkan untuk daerah Jawa-Madura pada 1 Februari 1947, namun sesudah tahun 1954 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 1954.⁵ Dari undang-undang yang terbentuk tidak ada yang mengarah pada peraturan perkawinan Islam. Namun, setelah adanya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terbentuk pada masa orde baru, menjadikan Peradilan Agama mendapat posisi yang kokoh. Apalagi di tahun 1974 terbentuknya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Bahkan di tahun 1975 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UUP No. 1/1974.⁶

Dalam pembentukan hukum sebuah negara, ada beberapa alasan yang mendukung mengapa masalah-masalah ini mendapat perhatian yang cukup besar. Selain alasan kultur yang berbeda dan terus berkembang jika dibandingkan dengan budaya Arab (khususnya), yang sering disebut sebagai awal munculnya hukum Islam, kecenderungan hukum Islam (fiqh) klasik yang dianggap masih sedikit diskriminatif terhadap status wanita juga menjadi perhatian dalam agenda pembentukan hukum dan perundang-undangan di negeri muslim.

³ Mu'in & Hendriyadi, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia", h. 72-73.

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/ol36uk366/dewan-agama-mesir-tolak-reformasihukum-perceraian> (diakses pada 11 November 2023 pukul 13.57 WIB).

⁵ Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi tentang Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 146-147.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 124.

Sehubungan dengan persoalan perceraian tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bagaimanakah sebuah negara Islam (atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim) mengatur tentang hal ini dalam bentuk perundang-undangan negara (hukum positif), khususnya pada aspek proses hukumnya (hukum Acara) yang mengambil objek penelitian pada dua negara Muslim, yaitu Mesir dan Indonesia. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif ini, penulis juga akan mencoba melihat bagaimana faktor sosiologis dan historis mempengaruhi pembentukan hukum pada masing-masing negara tersebut, termasuk pengaruh hukum-hukum (fiqh) klasik, yang kemudian akan penulis bandingkan dengan mencari letak persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan antara perundang-undangan di kedua negara tersebut.

Reformasi hukum di berbagai negara Islam membenahi semua aturan perceraian, reformasi hukum ini tak lepas dari tujuan ingin mengangkat status perempuan.⁷ Dimana aturan fiqh klasik dinilai diskriminatif terhadap kaum perempuan serta patriarki dalam sebagian produk hukumnya.⁸ Demikian yang terjadi di negara Mesir dan Indonesia, dua negara yang berbeda dalam konstitusi serta *sosio kultural* kepercayaan dalam beragama, serta ragam hukum yang dimiliki dari keduanya. Untuk itu kajian ini fokus pada reformasi hukum keluarga di Mesir dan Indonesia, dan pembaharuan hukum perceraian dalam hukum materiil di negara Mesir dan Indonesia. Serta, studi perbandingan hukum perceraian antara negara Mesir dan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perceraian dalam materi hukum keluarga Mesir dan Indonesia ?
2. Bagaimana regulasi yang menjamin pemenuhan hak ekonomi istri pasca perceraian dalam hukum keluarga Mesir dan Indonesia ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau kepustakaan.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari materi hukum negara Mesir dan Indonesia.¹⁰ Dengan metode studi komparatif antara dua komponen yang diteliti, lalu ditampilkan persamaan dan perbedaan, serta titik temu dari dua bahan hukum tersebut. Dalam

⁷ M. Atho' Mudzhar & Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 10-11.

⁸ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2001), h. 214.

⁹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 65.

¹⁰ Dudung Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 7.

tulisan ini, penulis mencoba melihat, mengkaji, dan mencermati bagaimana alasan perceraian, mekanisme, serta akibat perceraian di enam negara yang menjadi bahasan pokok dalam hukum keluarga (munakahat/perkawinan).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Perceraian dalam Materi Hukum Keluarga Mesir dan Indonesia

1) Mesir

Produk undang-undang Mesir mengenai perceraian secara real tertuang dalam undang-undang No 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian selain itu terdapat dalam undang-undang No. 25 Tahun 1929 tentang Perceraian yang kemudian mengalami Personal Status (Amandemen) menjadi Law No. 100 tahun 1985. Layaknya negara muslim lainnya, peran pengadilan atau instrumen negara dalam memutuskan suatu hal sengketa sangat diperlukan, meski Mesir terbilang negara beragama Islam tetapi dalam hal sengketa perdata Islam dalam hal ini perceraian tetap mematuhi prosedur yang diberlakukan oleh konstitusi hukum negara. Perceraian atau talak dalam fiqh merupakan hal yang dipandang sakral. Fiqh tidak memberi limitasi dimana pemberlakuan lafaz cerai, artinya boleh dilakukan dimana saja dan kapan saja. limitasi cerai hanya dalam jumlah melafazkan saja, baik talak I, II (talak raj'i) atau pilihan terakhir talak III (talak ba'in). Hal ini dipandang patriarki, dimana fiqh dianggap mencederai martabat wanita dan memberikan kebebasan terhadap kaum laki-laki. Dalam undang-undang Mesir diatur bahwa perceraian secara resmi harus diberitahukan kepada lembaga peradilan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 5A Law No. 100 tahun 1985: "seorang suami yang menceraikan istrinya akan mendapatkan surat (catatan) cerai dalam waktu 30 hari sejak waktu diputuskan oleh pengadilan. Jika sang istri hadir ketika surat (catatan) cerai dibuat, maka sang istri dianggap telah mengetahui keabsahan perceraian itu. Tapi jika dia tidak hadir, maka panitera akan meneruskannya melalui petugas pengadilan yang akan mengirimkan kepadanya atau kepada wakilnya copy-an dari surat cerai tersebut. Setiap perceraian mulai berlaku sejak diputuskan-kecuali suami menyembunyikan hal tersebut dari istrinya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal hak penggantian dan biaya finansial lainnya, dimana hal itu menjadi efektif sejak sang istri mengetahui tentang perceraian tersebut".¹¹ Hal ini, sudah keluar dari konsep fiqh yang dianut yakni madzhab Hanafi, bahkan madzhab lainnya pun dalam fiqh-fiqh oriented atau klasik tidak ditemukan penjatuhan talak di depan hakim. Tentu hal ini merupakan hal yang baru dalam hukum keluarga Islam.

Terkait pernyataan talak oleh suami di depan pengadilan akan berlaku jika dicatatkan dan pemberitahuan talak harus diberikan kepada istri. Karena perceraian tidak dianggap terjadi jika pemberitahuan talak belum sampai kepada istri. Hal ini

¹¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathy PVT. LTD, 1972), h. 37.

tertuang dalam dekrit presiden Anwar Sadat atas UU No. 44 tahun 1979 yang mengamandemen UU No. 20/1920 dan UU No. 25/1929. Dalam dekrit presiden tersebut juga mengatur kebolehan seorang istri melakukan permohonan cerai ke pengadilan melalui arbitrator, pengadilan berwenang mengakhiri pernikahan meskipun istri harus membayar kompensasi.¹² Alasan permohonan cerai ini jika dikaji dalam konteks fiqh selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam madzhab Maliki, artinya dalam perundang-undangan Mesir ditemukan pengadopsian pendapat dari mazhab selain Hanafi.

Terkait dengan permohonan cerai yang dilakukan oleh seorang istri, apabila permohonan (cerai) tersebut ditolak oleh hakim dan mengajukan bukti sedang si-istri tersebut tidak dapat dibuktikan (misal, penderitaan akibat suami yang kejam), maka istri bisa menunjuk arbitrator (penengah). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 - 11 UU No. 100/1985 berkenaan dengan arbitrase.¹³ Dalam kasus di mana suami menikah kembali dengan wanita lain yang biasa dikenal sebagai poligami, maka istri memiliki hak untuk meminta cerai karena kerugian ekonomi yang disebabkan oleh poligami sehingga mereka tidak dapat hidup bersama suaminya. Hak untuk mengajukan cerai hanya berlaku selama satu tahun setelah ia mengetahui perkawinan tersebut; jika lebih dari itu, hak tersebut hilang dengan sendirinya.¹⁴

Artinya permohonan cerai hanya diperuntukkan untuk alasan ekonomi saja, karena khawatir tidak mencukupi kebutuhan ekonomi. Sebagaimana terdapat limit waktu satu tahun sebagai jangka pengajuan cerai dan bila lebih dari jangka yang berlaku, artinya ekonomi bisa terpenuhi maka permohonan akan hilang dengan sendirinya. Beda halnya jika istri mengalami penderitaan yang diakibatkan poligami tersebut, maka istri boleh mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan (UU No. 25/1929). Sedangkan yang dimaksud penderitaan dalam hal poligami dijelaskan dalam UU No. 44 Tahun 1979 ialah, perbuatan poligami yang dilakukan seorang suami tanpa memberi tahu perkawinannya dan istri-nya tidak menyetujui.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa adanya poligami harus diketahui dan meminta persetujuan dari istri yang sah.

Sedangkan dalam masalah murtad menurut UU No. 100/1985, apabila suami yang murtad maka akan terjadi perceraian karena konstitusi undang-undang Mesir berdasarkan syariah melarang perkawinan antara laki-laki ahli kitab dengan wanita muslim. Beda halnya dengan istri yang murtad, maka perkawinan tetap dikatakan berlanjut atau sah. Karena undang-undang dan syariah tidak melarang hal itu.¹⁶

¹² Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, vol. 12 no. 2 (November 2015), h. 7-8.

¹³ John L. Esposito, ed, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Bandung: Mizan, 2001), h. 161-162.

¹⁴ Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: ...", h. 15.

¹⁵ Kurniati, "Hukum Keluarga di Mesir", *Jurnal al-Daulah*, vol. 3 no. 1 (Juni 2014), h. 28-29.

¹⁶ Isna Noor Fitria, "Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir", *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 03, no. 1 (Juni 2013), h. 79-80.

Mesir menjadikan madzhab Hanafi sebagai rujukan dalam hampir setiap regulasi. Begitu pun dengan hukum perdata, hukum hasil dari madzhab Hanafi diterapkan untuk seluruh warga negara secara sama rata tanpa memandang latar belakang agama. Dikecualikan dalam bidang pernikahan dan perceraian, penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi berhak menerapkan hukum dari agama mereka. Sebagaimana termaktub dalam **Bagian Pertama**, Pasal 76 Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata bagi yang Beragama Islam Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bagi yang Beragama Islam Nomor 1 Tahun 2000 (*Qanun Tandzim Ba"dh Auda" Wa Ijra"aat al-Taqaadiy Fii Masaail al-Ahwal al-Syakhshiyah*) sebagai berikut : *"Dalam hal tergugat/terhukum tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar tuntutan nafkah-nafkah dan pembayaran biaya-biaya, atau semacamnya, maka bagi penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan semula yang mengadilinya, atau kepada pengadilan, di mana eksekusi dilakukan, dan jika terbukti dalam persidangan bahwa tergugat/terhukum mampu untuk melunasi kewajibannya, dan telah diperintahkan untuk melunasinya tetapi tidak mau, maka dihukum untuk ditahan selama tidak lebih dari (maksimal) 30 hari. Jika tergugat/terhukum telah melunasi kewajibannya atau tergugat/terhukum telah menghadirkan seorang penanggung yang dapat diterima tanggungannya untuk pelunasan kewajibannya, maka tergugat/terhukum dilepaskan dari tahanan. Dan ketentuan ini tidak mengurangi hak penggugat melalui cara-cara yang biasa dalam pelaksanaan putusan. Dalam hal kasus-kasus tertentu, sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama ini, tidak dapat diberlakukan Pasal 293 KUHPid Mesir, selama penggugat melalui proses hukum acara sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama ini. Jika telah dilaksanakan hukuman Paksa Badan terhadap subjek hukum yang dimaksud pada pasal ini, kemudian dihukum dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 KUHPid Mesir, maka masa kama sanksi pidana penjara dikurangi dengan masa lama tahanan yang telah dilaksanakannya, dan jika ia dihukum dengan denda, maka dalam pelaksanaan putusan, jumlah dendanya dikurangi dengan masa tahanan, dengan ketentuan (perbandingan) nilai Ef5 (lima pounds egypt) untuk satu hari masa tahanan dalam Paksa Badan yang telah dilaksanakan."*

Berdasarkan pembahasan di atas, ditemukan 3 istilah yang digunakan dalam hukum acara yang berkaitan dengan pelaksanaan *executie verkoop* dalam hal tergugat/terhukum yang mampu, tetapi tidak mau melunasi kewajibannya, yakni istilah *al-Hajru* (Pembatasan/Cekal), *al-Ikrah al-Badani* (Paksa Badan), *al-Habsu* (Tahanan/Penjara).

2) Indonesia

Berbicara masalah perceraian di Indonesia, maka ada dua hukum yang mengikat di Indonesia yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil Inpres. No. 1 Tahun 1991. UU Perkawinan tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam semata. Melainkan undang-undang ini digunakan bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Sedangkan KHI sifatnya lebih khusus

sebagai hukum materil umat Islam dalam menghadapi masalah keperdataan Islam di Pengadilan Agama (PA).

Perceraian pada UU Perkawinan terdapat dalam Bab VIII yakni masalah putusannya perkawinan dan akibatnya, lebih spesifiknya diulas dalam butiran pasal 38 hingga pasal 41. Sedangkan lebih rinci mengenai perceraian diulas dalam butiran pasal KHI pada BAB XVI Putusnya Perkawinan. Baik UUP ataupun KHI, keduanya sama-sama menghitung jatuhnya perceraian di depan sidang pengadilan setelah usaha damai dilakukan. Keduanya juga membolehkan gugatan cerai atau cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri.

Secara gamblang butir undang-undang perceraian dalam UUP No. 1 Tahun 1974 hanya sedikit, sekitar 4 pasal (Pasal 38-Pasal 41). Lebih spesifiknya aturan perceraian umat Islam terdapat dalam KHI yang dengan menyeluruh menjelaskan secara detail bahkan lengkap dengan cara pengajuan gugatan cerai yang juga dilengkapi pengertian sebuah istilah yang dapat kita temukan hanya dalam kitab-kitab fiqh oriented. Meski keabsahan KHI hanya sebatas Inpres yang kekuatannya masih jauh di bawah Undang-Undang. Oleh karenanya dalam posisi hukum keluarga UU perkawinan tetap diposisikan pertama dalam mengikat sebuah putusan di pengadilan. Sebagaimana Asshiddiqie mengemukakan, setidaknya terdapat empat faktor dalam berlakunya sebuah undang-undang dengan meninjau faktor filosofis, yuridis, sosiologis dan faktor politis administratif.¹⁷

Perceraian di Indonesia terbilang sangatlah ketat dan rumit. Hal ini untuk tercapainya tujuan perkawinan, selain itu agar tidak ada yang dirugikan dari beberapa pihak terkait. Meski demikian angka perceraian di Indonesia tetap saja tinggi dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Regulasi yang Menjamin Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Mesir dan Indonesia

1). Indonesia

Pengaturan mengenai pemenuhan hak ekonomi istri pasca perceraian di Indonesia sebagai akibat dari putusannya perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibat dari putusannya perkawinan diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 166.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Ketentuan pada 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan kewajiban dari suami dan istri yang harus dipenuhi bila mereka memiliki anak. Dalam hal ini suami dan istri sebagai ayah dan ibu dari anak tetap mengemban tugas memelihara dan mendidik anak. Hanya saja yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetaplah suami sebagai ayah sang anak. Namun istri sebagai ibu pun dapat ikut memikul tanggung jawab tersebut apabila diputuskan oleh pengadilan. Selain kewajiban yang tertera dalam Pasal 41 tersebut, ada pula kewajiban- kewajiban lain bagi suami yang memutuskan untuk menceraikan talak istrinya. Secara jelas tertulis dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib :

- 1) Memberikan mut^{ah} yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*,
- 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian, pen) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *baⁱⁿ* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan, pen.) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hak ekonomi istri akibat perceraian talak pun dituliskan dalam ketentuan lain : Pasal 151 yaitu Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Pasal 158 yaitu : Mut^{ah} wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri *ba^{da} al-dukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 yaitu Besarnya mut^{ah} disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sayangnya masih memiliki celah bagi suami untuk melakukan pengingkaran atas kewajibannya dikarenakan tidak adanya ketentuan hukuman. Oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, maka hakim dapat melakukan *ijtihad* untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh *ijtihad* yang dilakukan oleh hakim adalah yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Batusangkar. Langkah pertama yang dilakukan ketika suami tidak melakukan kewajibannya adalah dengan menunda ikrar talak. Dalam persidangan ikrar talak, hakim dapat menunda pelaksanaan ikrar talak apabila hakim menganggap itu diperlukan. Penundaan tersebut dilakukan agar putusan tidak hampa, dan mengandung manfaat bagi masing-masing pihak dan mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, masa pelaksanaan ikrar

talak dalam pasal 70 UU PA adalah paling lama enam bulan. Jadi selama enam bulan hakim dapat menunda pelaksanaan ikrar talak selama kewajiban suami belum dilaksanakan. Dalam hal pihak istri meminta pelaksanaan ikrar talak tetap dilaksanakan dengan alasan masalah pembayaran kewajiban suami akan diselesaikan secara kekeluargaan, hakim dapat melanjutkan pelaksanaan ikrar talak tersebut. Ataupun apabila pihak istri mengatakan bahwa dia rela haknya belum terpenuhi dan ingin pelaksanaan ikrar talak segera dilaksanakan maka hakim dapat melakukannya. Langkah kedua adalah bila pada saat sidang pelaksanaan ikrar talak, suami belum membayarkan kewajibannya maka hakim akan berupaya menggugah hati suami agar dia mengerti dan sadar sehingga perilakunya tidak mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.

2). Mesir

Mesir menjadikan madzhab Hanafi sebagai rujukan dalam hampir setiap regulasi. Begitu pun dengan hukum perdata, hukum hasil dari madzhab Hanafi diterapkan untuk seluruh warga negara secara sama rata tanpa memandang latar belakang agama. Dikecualikan dalam bidang pernikahan dan perceraian, penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi berhak menerapkan hukum dari agama mereka.

Sebagaimana termaktub dalam Bagian Pertama, Pasal 76 Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata bagi yang Beragama Islam Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perubahan kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bagi yang Beragama Islam Nomor 1 Tahun 2000 (Qanun Tandzim Ba"dh Auda" Wa Ijra"aat al-Taqaadiy Fii Masaail al-Ahwal al-Syakhshiyah) sebagai berikut :

"Dalam hal tergugat/terhukum tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar tuntutan nafkah-nafkah dan pembayaran biaya-biaya, atau semacamnya, maka bagi penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan semula yang mengadilinya, atau kepada pengadilan, di mana eksekusi dilakukan, dan jika terbukti dalam persidangan bahwa tergugat/terhukum mampu untuk melunasi kewajibannya, dan telah diperintahkan untuk melunasinya tetapi tidak mau, maka dihukum untuk ditahan selama tidak lebih dari (maksimal) 30 hari.

Jika tergugat/terhukum telah melunasi kewajibannya atau tergugat/terhukum telah menghadirkan seorang penanggung yang dapat diterima tanggungannya untuk pelunasan kewajibannya, maka tergugat/terhukum dilepaskan dari tahanan. Dan ketentuan ini tidak mengurangi hak penggugat melalui cara-cara yang biasa dalam pelaksanaan putusan.

Dalam hal kasus-kasus tertentu, sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama ini, tidak dapat diberlakukan Pasal 293 KUHPid Mesir, selama penggugat melalui proses hukum acara sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama ini.

Jika telah dilaksanakan hukuman Paksa Badan terhadap subjek hukum yang dimaksud pada pasal ini, kemudian dihukum dengan pidana penjara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 293 KUHPid Mesir, maka masa kama sanksi pidana penjara dikurangi dengan masa lama tahanan yang telah dilaksanakannya, dan jika ia dihukum dengan denda, maka dalam pelaksanaan putusan, jumlah dendanya dikurangi dengan masa tahanan, dengan ketentuan (perbandingan) nilai Ef 5 (lima pounds egypt) untuk satu hari masa tahanan dalam Paksa Badan yang telah dilaksanakan.”

Berdasarkan pembahasan di atas, ditemukan 3 istilah yang digunakan dalam hukum acara yang berkaitan dengan pelaksanaan *executie verkoop* dalam hal tergugat/terhukum yang mampu, tetapi tidak mau melunasi kewajibannya, yakni istilah *al-Hajru* (Pembatasan/Cekal), *al-Ikrah al-Badani* (Paksa Badan), *al-Habsu* (Tahanan/Penjara).

Analisis Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia

Telah diketahui bersama berdasar konsep yang ada bahwa substansi hukum keluarga (perceraian) yang telah berlaku di kedua negara, Mesir-Indonesia. bahwa kedua negara memang sudah keluar dari keterkungkungan pemahaman fiqh klasik. Mesir yang merupakan negara Islam, bisa beranjak dan mengalami konstruksi terhadap hukum keluarga (perceraian), apalagi Indonesia yang memang bukan negara Islam. Kedua hukum perkawinan yang berlaku di Mesir dan Indonesia telah mencoba lari dari ketimpangan hukum. Faktanya fiqh klasik memang patriarki yang mempersempit ruang gerak kaum perempuan, serta kewenangan lebar atas beberapa akses yang seakan memberi kebebasan kepada kaum lelaki. Hadirnya undang-undang tentang hukum keluarga di dunia Islam utamanya dalam perceraian memberikan nuansa baru dengan mengakui hak-hak perempuan dalam perkawinan.¹⁸

Berdasarkan hal ini dilakukan kajian mendalam serta fokus pada perbandingan di antara dua negara, dimana salah satunya adalah negara Islam (Mesir) sedang pembanding lainnya adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim di dunia (Indonesia). Studi komparatif ini dengan meninjau dari segi perbandingan vertikal, perbandingan horizontal dan perbandingan diagonal.

1) Analisis Perbandingan Vertikal

Analisis perbandingan vertikal merupakan analisis yang dalam melakukan analisa lebih menekankan pada konsep fiqh madzhab dan perundang-undangan dalam hal ini terfokus pada masalah perceraian. Mesir-Indonesia, terbilang memiliki perbedaan dalam sistem ketatanegaraan. Keduanya berbeda dalam hal konstitusi bernegara. Mesir merupakan negara yang menganut sistem agama (teokrasi) dengan pondasi syariat Islam, meski demikian keberadaan umat agama lain, juga terjamin

¹⁸ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

dengan undang-undang. Sekian banyak umat Islam yang berada di Mesir, menganut paham sunni mazhab Hanafi.

Berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) dengan sistem demokrasi. tetapi Islam Indonesia merupakan Islam mayoritas di dunia setara dengan 13% populasi umat muslim dunia.¹⁹ Pemahaman aliran keagamaan dalam bermadzhab di Indonesia terbilang beragam, namun terbesar pengikutnya adalah madzhab Syafi'iyah. Hal ini juga berpengaruh dalam produk undang-undang, yang dominan dipakai adalah madzhab Syafi'i, tetapi negara tidak menyatakan secara legal bahwa Indonesia menganut madzhab Syafi'i.

2) Analisis Perbandingan Horizontal

Analisis perbandingan horizontal dalam kajiannya akan menganalisa lebih dalam mengenai fokus hukum materil, berkenaan dengan hukum perceraian Islam antar dua negara, Mesir dan Indonesia. Setelah isi dari hukum perceraian dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, kini analisa sejauh mana perbandingan horizontal antara kedua negara tersebut. Dalam hukum perceraian Mesir telah diketahui bahwa seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai akibat suami yang poligami dengan alasan ketidakmampuan ekonomi.

Sedangkan dalam alasan lain seperti tidak adanya izin dari istri juga sah. Beda halnya dengan Indonesia, baik dalam UU Perkawinan No. 1/1974 maupun KHI tidak menyatakan secara jelas bolehnya melakukan gugatan cerai akibat poligami. Hanya saja menurut analisis penulis, gugatan cerai dapat dilakukan ketika suami-istri mengalami perselisihan sebagai bentuk mencuatnya emosi akibat praktik poligami.

Perbedaan mencolok dari materi hukum perceraian Mesir dengan Indonesia adalah dalam hal perkawinan beda agama. Di Mesir apabila seorang istri murtad atau beda agama (ahli kitab), maka perkawinan tetap dibenarkan atau berlanjut. Sedangkan bila suami yang beda agama (ahli kitab) atau murtad maka pernikahan secara nyata tidak dibenarkan atau terjadi perceraian. Sedangkan di Indonesia sendiri secara tegas melarang adanya pernikahan beda agama sebagaimana disebut dalam Pasal 75 huruf (a) Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini secara jelas melarang perkawinan beda agama dengan redaksi "salah satu suami atau istri murtad".

Meski terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum perceraian Mesir dengan Indonesia. Namun dari kedua negara menerapkan persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya reformasi hukum yang dilakukan dari kedua negara tersebut telah mencoba memberikan hak-hak wanita untuk tidak terdiskriminasi secara hukum atau menerapkan keadilan gender. Seperti, adanya pencatatan perkawinan, pembatasan umur nikah, penjatuhan

¹⁹ <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/> (diakses, 11 November 2023 pukul 14.48 WIB).

talak harus di pengadilan, terjadinya poligami atas izin istri sah dan pengadilan serta aspek hukum lainnya.

3) Analisis Perbandingan Diagonal

Analisis perbandingan diagonal difokuskan pada kajian perkembangan reformasi hukum keluarga Islam, serta dengan mencari tipologi pembaharuan hukum keluarga dari masing-masing negara, Mesir dan Indonesia. Berdasarkan perkembangan historis reformasi hukum keluarga yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa Mesir merupakan negara Islam pertama di kawasan Arab yang melakukan reformasi hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang. Hal ini dipicu karena pengaruh kekuasaan Turki Usmani. Pengaruh ini diakibatkan dari lahirnya Majallat al-ahkam al-adliyah yang merupakan pembuatan kodifikasi hukum keluarga (family law) pada era tanzimat. Pengaruh inilah yang kemudian melahirkan paradigma cendikia muslim Mesir untuk melahirkan sebuah kodifikasi undang-undang yang berupa UU No. 25/1920.²⁰ Konsekuensi logis lainnya adalah berpindahnya kepercayaan bermadzhab dari yang mayoritas Maliki menjadi pengikut madzhab Hanafi hingga diresmikan menjadi mazhab resmi negara.

Sedangkan Indonesia pengaruh terbesar dalam reformasi hukum keluarga adalah Belanda yang menjajah kurang lebih 360 tahun. Bahkan terdapat sebuah acuan hukum dalam masalah perkawinan dan waris yang disebut *compendium freijer*.²¹ Bahkan pengaruh Belanda juga terasa hingga saat ini, ada banyak undang-undang yang terlegislasi masih mengadopsi hukum barat yang termanifestasi dalam *Staatsblad (Stbd)*, *Burgerlijk Wetboek (BW)*, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Recht Reglement Voor De Buitengewesten (RBG)* dan lainnya.

Sedangkan tipologi pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh kedua negara dalam mereformasi hukum tergolong adaptif unifikasi madzhab serta intra doctrinal reform. Terbilang adaptif karena seiring zaman hukum tetap responsif serta tetap mempertimbangkan fiqh yang ada dan tidak antisipatif dari isu gender. Seperti adanya pencatatan perkawinan, izin poligami, talak di depan sidang pengadilan dan sebagainya. Selain itu juga kita ketahui bersama bahwa Mesir dan Indonesia dalam legislasi hukum keluarga tidak pasif pada satu pertimbangan madzhab hal ini tentunya yang dinamakan unifikasi madzhab. Sedangkan yang dimaksud intra doctrinal reform ialah adanya metode *talfiq*, *takhyir* dan *siyasah syar'iyah* dengan tujuan demi kemaslahatan masyarakat atau umat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa antara Mesir dan Indonesia dalam satu sisi terdapat persamaan sedang dalam tinjauan sisi yang lain malah mencolok perbedaan.

²⁰ Ikhwan, "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat (Suatu Tinjauan Historis Sosiologis)", *Jurnal Inovation*, vol. 6 no. 12 (Juli-Desember 2007), h. 341.

²¹ Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", h. 152.

4. KESIMPULAN

Analisis perbandingan antara hukum perceraian Mesir dan Indonesia mengungkap perbedaan yang mencolok dalam pendekatan hukum dan sistem ketatanegaraan. Mesir, sebagai negara teokratis dengan dasar syariat Islam, mengadopsi madzhab Hanafi, sementara Indonesia, sebagai negara hukum demokratis, memiliki keragaman pemahaman agama, dengan madzhab Syafi'iyah mendominasi undang-undang. Dalam perbandingan horizontal, perbedaan-perbedaan mencolok muncul, seperti gugatan cerai akibat poligami dan perlakuan terhadap perkawinan beda agama. Mesir memperbolehkan gugatan cerai akibat suami poligami dengan alasan ekonomi atau ketidaksetujuan istri, sementara Indonesia tidak secara jelas mengatur hal tersebut. Mesir juga membenarkan perkawinan tetap berlanjut jika istri beda agama, sedangkan Indonesia melarang perkawinan beda agama. Dalam perbandingan diagonal, Mesir mengalami reformasi hukum keluarga sebagai negara Islam pertama di kawasan Arab, dipengaruhi oleh Turki Usmani dan mengadopsi madzhab Hanafi. Sementara itu, Indonesia, yang dipengaruhi oleh penjajahan Belanda, menerima pengaruh hukum Barat dalam reformasi hukum keluarga. Keduanya menunjukkan adaptabilitas, unifikasi madzhab, dan reformasi intra doctrinal dalam upaya mencapai keadilan gender.

Selain itu perbedaan pada regulasi yang dimiliki kedua negara, di Mesir regulasi terkait perceraian diatur secara terpisah, sedangkan regulasi terkait perceraian di Indonesia diatur berbarengan dengan UU Perkawinan. Meskipun perbedaan yang signifikan, kedua negara ini secara bersama-sama menerapkan hak-hak wanita dan prinsip keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Mesir dan Indonesia, dalam upaya reformasi hukum keluarga, menunjukkan upaya untuk merespons zaman dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat atau umat. Perbandingan ini menyoroti perbedaan dan persamaan yang kompleks antara dua negara dengan konteks hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Abdurrohman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Anderson, J. N. D.. Hukum Islam di Dunia Modern, Terj. Machnoun Husen. Surabaya: Amarpress, 1991.
- Asshiddiqe, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Rajawali, 2000.
- Ensiklopedi Islam. Jilid 3. Jakarta: Pt. Ikhtiyar Baru Van Hoever, 1994.
- Esposito, John L. ed, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan, 2001.
- Esposito, John L.. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan, 2001.
- Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Hamami, Taufiq. Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dan Sistem Tata Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni, 2003.
- Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Lev, Daniel S. Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Study Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum. Terj. Zaini A. Noeh. Jakarta: Intermasa, 1986.
- M, Hajar. Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Mahmood, Tahir. Family Law Reform in The Muslim World. Bombay: N.M. Tripathy PVT. LTD, 1972.
- Mudzhar, M. Atho' & Nasution, Khairuddin. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Murata, Sachiko. The Tao of Islam. Bandung: Mizan, 1997. Musyarrafah, Athiyah Musthafa. al-Qadha' fi al-Islam. t.tp.: t.p., 1992.
- Nasution, Khairuddin. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi tentang Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS, 2002.
- Ramulyo, M Idris. Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: Ind-Hill, 1991.

Jurnal

- Fatwa, Ach. Fajruddin. "Akar Historik Hukum Islam". al-Qanun, vol. 8 no. 2 (Desember 2004).

- Fitria, Isna Noor. "Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir". *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 03, no. 1 (Juni 2013).
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Hatta, Moh. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia". *al-Qanun*, vol. 11 no. 1 (Juni 2008).
- Ikhwan. "Reformasi Hukum di Turki Usmani Era Tanzimat. Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis", *Jurnal Inovation*, vol. 6 no. 12 (Juli-Desember 2007).
- Kurniati. "Hukum Keluarga di Mesir". *al-Daulah*, vol. 3 no. 1 (Juni 2014).
- Sadari. "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia", *Istinbath: Jurnal Hukum*, vol. 12 no. 2 (November 2015).
- Ulum, Miftahul. Rohman, Moh. Mujibur & Mohsi. "Taqnin al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia)". *Ulumuna; Jurnal Studi Keislaman*, vol. 6 no. 1 (Juni 2020).
- Wahib, Ahmad Buyan. "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim". *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 14, no. 1 (Juni 2014).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website Internet

<http://ikadabandung.wordpress.com/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun1973-di-indonesia/> (diakses, 11 November 2023).

<https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-didunia/> (diakses 11 November 2023).

<https://www.republika.co.id/berita/0136uk366/dewan-agama-mesir-tolakreformasi-hukum-perceraian> (diakses pada 11 November 2023).